

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

Pengembangan dan implementasi sistem informasi (SI) telah menjadi penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. Sistem informasi memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi, sehingga memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan komunikasi antar berbagai departemen (Pearlson, Saunders, & Galletta, 2021). Penggunaan SI mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, keuangan, pendidikan, dan manufaktur, masing-masing mendapatkan manfaat dari solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri (Turban, Pollard, & Wood, 2021). Misalnya, di sektor kesehatan, sistem informasi meningkatkan perawatan pasien melalui rekam medis elektronik dan telemedicine, sementara di sektor keuangan, mereka memperlancar pemrosesan transaksi dan manajemen risiko (O'Brien & Marakas, 2021). Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analitik big data, dan komputasi awan semakin memperkuat kemampuan sistem informasi, mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif di era digital (Rainer et al., 2022; Bourgeois & Smith, 2021).

Sistem politik di Indonesia adalah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam struktur politiknya sejak merdeka dari Belanda pada tahun 1945, mulai dari sistem parlementer hingga beralih ke sistem presidensial pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan liberalisasi politik, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan institusi demokrasi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini diatur oleh UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar yang dimiliki Indonesia, telah mengalami beberapa kali amandemen untuk

memperkuat mekanisme *checks and balances* serta menjamin hak asasi manusia (Sukma, 2019). Lembaga legislatif Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif, dan sejak era reformasi, pemilu di Indonesia dianggap semakin bebas dan adil, dengan partisipasi politik yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat (Muhtadi, 2019). Selain itu, otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 2001 telah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, memperkuat desentralisasi dan demokrasi di tingkat lokal (Firman, 2020). Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem politiknya, termasuk korupsi, politik uang, dan polarisasi politik (Harsono, 2019).

Pada februari 2024 ini akan dilakukan pemilu serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini diselenggarakan pemilihan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan provinsi. Tahapan pemilu dimulai pada Juni 2022, pemungutan suara pada 14 Februari 2024, sampai paling akhir adalah Pengucapan Sumpah sekaligus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada oktober 2024. (PKPU No 3 Tahun 2022). Wilayah pemilihan mencakup 38 provinsi, termasuk 3 provinsi baru di Papua, secara total ada 2.748 daerah pemilihan terdiri dari daerah pemilihan untuk calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (infopemilu.kpu.go.id, 2023).

Sistem informasi politik di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat terhadap data dan informasi politik, mulai dari hasil pemilu, kebijakan publik, hingga aktivitas legislatif. Sistem informasi politik juga mendukung e-governance, yang

meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara melalui platform digital, serta memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Di era digital ini, berbagai inisiatif seperti portal keterbukaan informasi publik, aplikasi pengawasan pemilu, dan platform partisipasi publik online telah diimplementasikan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia (Nugroho, 2021). Meski demikian, tantangan seperti keamanan data, privasi, dan ketimpangan akses teknologi masih perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penggunaan sistem informasi politik (Putra & Hidayat, 2022).

Aplikasi web adalah program yang dapat diakses melalui peramban web dan berfungsi di dalam lingkungan web server. Aplikasi ini memainkan peran penting dalam era digital saat ini, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dan informasi secara online tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan di perangkat mereka. Aplikasi web mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari media sosial, e-commerce, perbankan online, hingga sistem manajemen konten. Pengembangan aplikasi web umumnya melibatkan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript di sisi klien, serta bahasa pemrograman seperti Python, PHP, dan Java di sisi server. Keunggulan utama aplikasi web adalah aksesibilitasnya yang mudah, pemeliharaan yang lebih sederhana, dan kemampuan untuk diperbarui secara real-time tanpa memerlukan tindakan dari pengguna (Wijaya, 2021). Namun, tantangan seperti keamanan data, kinerja, dan kompatibilitas lintas peramban tetap menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan penerapan aplikasi web (Saputra, 2022)

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi

1.2.1 Maksud Kerja Profesi

Maksud dari kerja profesi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki praktikan dalam bidang pengetahuan sistem informasi mencapai hasil yang diinginkan.

1.2.2 Tujuan Kerja Profesi

Tujuan dari kerja profesi untuk memberikan kontribusi yang bermakna dalam bidang pekerjaan tertentu, baik melalui penyediaan layanan, solusi terhadap masalah, atau peningkatan kualitas dalam konteks kerja.

1.3 Tempat Kerja Profesi

Kerja profesi studi independen dilakukan di lingkungan domisili penulis yaitu di RT 05 RW 06 Desa Cikande, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Kerja profesi studi independen dilakukan 50 hari kerja (10 Pekan) mulai dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 23 Februari 2024.